

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan adalah suatu yang dilakukan entitas pelaporan terhadap laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang terstruktur. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Apabila laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang tercantum pada peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan dan kinerja dinas pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk kewajiban atas pengerjaan keuangan daerah dan negara selama periode waktu tertentu. Setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah daerah akan dinilai oleh auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah terhadap BPK dapat dibagikan menjadi empat jenis, yaitu Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). BPK akan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPD jika laporan keuangan di pemerintah daerah diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Indriasih, 2014).

Kualitas laporan keuangan yang buruk akan berdampak negatif bagi pemerintah itu sendiri. Salah satu dampaknya adalah mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap pengendalian dana dan kualitas pengambilan keputusannya negatif (Alfiani, 2017). Pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Sebagaimana diterangkan dalam Friman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu yang menjelaskan wajibnya menuaikan amanah kepada pemiliknya (Abdillah, 2010).

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَهَا

Artinya: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu.” (HR. Abu Daud no. 3535 dan At Tirmidzi no. 1624, hasan shahih).

Kandungan dalam QS. Al-Anfal ayat 27 dan Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia, untuk menjaga amanah yang diamanahkan kepada kita dalam hal apapun jika tidak bisa menangani amanah yang telah diberikan kepada mereka maka akan dapat menimbulkan kerusakan. Implementasi ayat tersebut adalah sikap amanah dan keterbukaan

kepada masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan ayat dan Hadits tersebut pemerintah daerah harus amanah dalam pengelolaan keuangan di pemerintah daerah.

Pemeriksaan BPK tidak hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan saja tetapi juga menilai pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dengan adanya pengendalian internal yang baik dapat mempermudah memverifikasi keandalan dan ketelitian data akuntansi serta dapat menghindari risiko kekeliruan dan kesalahan pencatatan (Armel, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Pengendalian internal merupakan proses integral pada kegiatan dan tindakan yang terus berulang yang dilaksanakan oleh pemimpin dan semua tenaga kerja guna memberikan kelayakan yang mencukupi tercapainya tujuan organisasi dengan kegiatan yang baik dan tepat, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Ridzal *et. al.*, (2022). Menyatakan bahwa jika sistem pengendalian internal secara parsial akan berdampak positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pengendalian internal merupakan salah satu fondasi dalam penyusunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga tidak kalah penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik. Untuk membantu pengelolaan data agar dapat lebih tepat, akurat dan cepat harus menerapkan penggunaan teknologi yang baik. Dengan adanya pengawasan keuangan maka proses dalam pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan semestinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibatnya kinerja keuangan dapat

dihasilkan dengan baik (Yanti *et. al.*, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan Yanti *et. al.*, (2020) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan kepada kualitas laporan keuangan. Sehingga pemanfaatan sistem informasi akuntansi membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Selain pemanfaatan sistem informasi akuntansi pemahaman standar akuntansi pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Evicahyani & Nyoman, 2016). Pemahaman standar akuntansi pemerintah yang baik merupakan salah satu penyebab kualitas laporan keuangan, sehingga harus paham betul mengenai SAP umum yang benar dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tinggi dan relevan. Standar akuntansi pemerintah yang baik dapat memenuhi kualitas karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemahaman SAP yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan dapat memberikan solusi untuk permasalahan keuangan yang terdapat di instansi pemerintah (Nugraheni & Subaweh, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan Puspita *et. al.*, (2020) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga pegawai harus paham betul mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintah

Sumber daya manusia dalam suatu instansi memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri, semakin tinggi kualitas SDM di suatu instansi akan membuktikan kualitas kompetitif lembaga pemerintah itu

sendiri (Armel, 2017). Salah satu faktor keberhasilan instansi karena memiliki nilai sumber daya manusia yang kompeten (Wahyuni, 2021). Sumber daya manusia yang kompeten didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dengan baik, dan mengikuti pelatihan dibidang keuangan (Sambuaga, 2020).

Hal ini akan mendukung untuk pemahaman SAP dan memanfaatkan SIA guna mewujudkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas (Sihale *et. al.*, 2020). Sumber daya manusia yang kompeten didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dengan baik, dan mengikuti pelatihan dibidang keuangan (Sambuaga, 2020)

Menurut data opini pemeriksaan LKPD perwakilan Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2019 masih ada beberapa daerah yang meraih opini WDP oleh BPK. Berikut Data perolehan opini pemeriksaan LKPD di Jawa Tengah:

Tabel 1.1
Opini Pemeriksaan LKPD

No	Opini BPK	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	32	35	36
2	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	-	-	-
3	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	4	1	-
4	Tidak Wajar (TW)	-	-	-

Sumber: <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>

Dilihat dari tabel 1.1 opini pemeriksaan LKPD pada tiap-tiap daerah di provinsi Jawa Tengah telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perolehan WTP dapat artikan bahwa pemerintah mampu menjalankan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Melansir dari rri.co.id (2021) memberitakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2020 pada Kabupaten Tegal masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut Umi Azizah selaku bupati Kabupaten Tegal, disamping menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta harus memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpanan, meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan, teknologi informasi dan inspektorat lebih proaktif mengonsultasikan permasalahan melalui APIP.

Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021 mengungkapkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan yang terdiri atas 5.366 permasalahan SPI dan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan sebesar Rp.2,35 triliun. Rekapitulasi kelamahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (IHPS1 tahun 2021). BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.544 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 4.524 permasalahan sebesar Rp2,35 triliun dan penyimpangan administrasi (ww.bpk.go.id -IHPS 1 tahun 2021).

Hasil pemeriksaan BPK pada Kabupaten Tegal tahun 2021 mengungkapkan masih terdapat kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tegal, antara lain:

- a. Data peserta JKN PBPU-BP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal belum sepenuhnya dimutakhirkan dan diverifikasi secara tertib dan terintegrasi sehingga pada tahun 2021 terdapat pembayaran iuran untuk peserta yang tidak berhak minimal sebesar RP131,04 juta.
- b. Penatausahaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai antara lain kesalahan reklasifikasi atas realisasi belanja barang dan belanja modal dana BOS tahun 2021 sehingga penyusunan laporan keuangan Dinas Dikbud mengalami keterlambatan dan kurang akurat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohmah *et. al.*, (2020) yang meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan di kota Malang. Hal yang membedakan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terdapat dari segi lokasi penelitian, penelitian terdahulu memfokuskan pada pemerintah daerah yang dilakukan pada OPD di Kota Malang, namun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada OPD di Kabupaten Tegal dan pada penelitian ini menggunakan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel pemoderasi karena ingin mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, serta Analisis dalam penelitian terdahulu memakai SPSS 22 (*Statistical Product And Service Solution*). Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM-PLS melalui aplikasi *SmartPLS v. 3. 0*. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada OPD Kabupaten Tegal)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5. Untuk menguji dan meneliti secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6. Untuk menguji dan meneliti secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penyusunan penelitian pada masa yang akan datang terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yaitu dibidang sektor publik yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan strategi dalam memajukan sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat peneliti ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyediakan informasi dan perkembangan terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, serta menambah literatur akuntansi yaitu dibidang sektor publik yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah. Serta penelitian ini dapat menambah wawasan terkait akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen pemerintah daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah.